

# ANALISIS TATA KELOLA ZAKAT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP EFISIENSI PENYALURAN ZAKAT

Novendi Arkham Muhtadi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Received : May 31<sup>st</sup> 2022 | Revised : Aug 02<sup>nd</sup> 2022 | Accepted : Sep 30<sup>th</sup> 2022

## ABSTRAK

Tata kelola zakat merupakan salah satu elemen yang dianggap mampu mempengaruhi efektivitas penyaluran zakat. Jumlah dewan dan jumlah profesional di dewan adalah dua penanda tata kelola zakat karena dianggap relevan dengan konsep akuntabilitas yang termasuk dalam Sharia Enterprise Theory. Penelitian ini menggunakan pedoman zakat internasional yang baru dirilis pada tahun 2016, yaitu Zakat Core Principles (ZCP). Sebagai hasilnya, diharapkan dapat mengatasi kekurangan penelitian sebelumnya dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Unit analisis untuk studi empiris ini adalah 25, dan sampel dikumpulkan dari lima Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kota dan Kabupaten Pekalongan selama periode pengamatan 2016–2020. Informasi diambil dari laporan tahunan masing-masing OPZ. Efektivitas penyaluran zakat dipengaruhi oleh jumlah dewan dan jumlah profesional dalam dewan, sesuai dengan temuan studi regresi yang dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel 2016. Untuk mencapai pengelolaan zakat yang efisien, OPZ harus lebih memperhatikan masalah tata kelola zakat, terutama ketika mempertimbangkan jumlah dewan dan jumlah profesional dalam dewan. Ukuran sampel yang kecil hanya lima OPZ dan periode pengamatan singkat hanya lima tahun adalah keterbatasan penelitian.

**Kata kunci:** Tata Kelola Zakat, Efisiensi Penyaluran Zakat, Organisasi Pengelola Zakat

## PENDAHULUAN

Para ekonom muslim berpendapat bahwa sistem ekonomi islam dibangun atas dua elemen, yaitu tereliminasi riba dan teraktualisasikannya zakat (Didin, 2009: 85). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT berikut:

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itu) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (ar-Rum: 39)*

Zakat adalah urusan pribadi yang pelaksanaannya bergantung pada kesadaran pribadi. Tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keseimbangan antara mereka yang memiliki uang ekstra dan mereka yang tidak (Nurul, 2014). Zakat sangat penting untuk mempromosikan dan memperkuat ekonomi lokal (Wahab dan Rahman, 2011). Masyarakat harus mampu mencapai keadilan sosial ekonomi melalui zakat (Kahf, 1989).

Efektivitas lembaga pengelola menjadi indikator pengelolaan zakat yang baik (Mutiara et al., 2013). Dua komponen utama pengelolaan zakat adalah pengumpulan dan penyaluran (Oran, 2009). Menurut Mustaffha (2007), penyaluran zakat perlu

dilakukan dengan perhatian yang lebih besar karena harus sampai kepada individu yang benar yaitu khusus untuk delapan asnaf yang disebutkan dalam at-Taubah ayat 60.

Operasional perusahaan harus dipantau kinerjanya untuk memastikan mereka berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tujuannya (Noor et al., 2014). Menurut Ahmad dan Ma'in (2014), efisiensi menampilkan output maksimum yang mungkin diberikan pada input yang ada. Rahman (2007) menegaskan definisi efisiensi yang lebih luas. Menurutnya, efisiensi berguna untuk menilai dan meningkatkan kinerja organisasi, termasuk OPZ. Efisiensi dalam OPZ ditentukan oleh bagaimana input diubah menjadi output. Menurut Noor dkk. (2015), salah satu tujuan evaluasi kinerja adalah untuk mengukur efektivitas sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban pemangku kepentingan atas zakat dan pengabdianannya kepada Allah SWT.

Nasher (2009) pernah menilai tingkat produktivitas pada sembilan OPZ di Indonesia. Biaya personalia, biaya sosialisasi, dan biaya operasional merupakan variabel input yang digunakan. Sedangkan uang yang disalurkan dan yang terkumpul merupakan variabel keluaran penelitian. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan untuk sembilan OPZ (BAZNAS, Dompot Dhuafa, LAZIS Muhammadiyah, PKPU, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Yayasan Baitul Maal BRI, Bamuis BNI, Rumah Zakat, dan Baitul Maal Muamalat) pada tahun 2007, hasilnya hanya dua OPZ—Bamuis BNI dan Baitul Maal Muamalat—yang dinilai efektif. Hal ini terjadi salah satunya sebagai akibat dari pemilihan variabel yang kurang baik oleh peneliti, dalam hal ini uang yang terkumpul. Lebih baik memasukkan variabel dana yang terkumpul dalam variabel input daripada variabel output.

Menurut Muhammad dan Bambang (2007), salah satu komponen penting dalam mendorong efisiensi adalah tata kelola. Kerangka kerja dibuat

oleh Wahab dan Rahman (2011) untuk mengevaluasi efektivitas dan administrasi zakat (tata kelola zakat). Untuk produktivitas yang lebih besar, mereka menggarisbawahi pentingnya menganalisis efisiensi dan tata kelola zakat. Dalam disertasinya, Wahab (2013) menegaskan bahwa ada hubungan antara efektivitas dan tata kelola. Hana dan Muhammad (2015) membuat klaim yang sama, yang menyatakan bahwa tata kelola zakat sangat penting untuk memastikan bahwa uang zakat digunakan secara efektif.

Standar pengelolaan zakat terbaru, yang dikenal sebagai Zakat Core Principles (ZCP), secara resmi diperkenalkan di Turki pada 26 Mei 2016. ZCP berfungsi sebagai standar untuk mengelola zakat secara internasional maupun di Indonesia. Di berbagai negara, ada perbedaan dalam cara pengelolaan zakat. Aan (2016) melihat adanya perbedaan dalam pengelolaan zakat antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Alhasil, Brunei Darussalam lebih efektif dari pada Indonesia dalam hal efisiensi. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari sejumlah faktor, termasuk regulasi dan administrasi OPZ yang lebih kuat di Brunei Darussalam. Menurut BAZNAS, ruang untuk zakat nasional masih banyak, namun karena pengelolaan zakat yang belum optimal, maka ada persoalan efisiensi penyaluran zakat. Selain itu, ada variabel lain yang menyebabkan distribusi zakat Indonesia kurang efisien dibandingkan Brunei Darussalam, seperti wilayah yang lebih luas dan jumlah penduduk yang lebih banyak.

Di berbagai tempat, pertumbuhan penghimpunan zakat bervariasi dari tahun ke tahun. Misalnya, Kota Pekalongan yang juga dikenal sebagai Kota Batik, dan Kabupaten Pekalongan yang juga dikenal sebagai Kota Santri. Masih kuatnya rasa supremasi manajemen antara OPZ yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Misalnya, BAZNAS

Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan 226% dalam pertumbuhan penghimpunan zakat antara tahun 2018 dan 2019. Jumlah tersebut berasal dari Rp. 1.685.808.689 pengumpulan pada tahun 2018, meningkat menjadi Rp. 3.808.750.806 pada tahun 2019. Sementara itu, hal berbeda terjadi di BAZNAS Kota Pekalongan antara tahun 2015 dan 2017, seperti terlihat pada table berikut:

**Tabel 1. Pertumbuhan Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota Pekalongan 2015-2017**

Tahun	Penghimpunan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2015	1.660.117.543	
2016	1.501.672.274	90
2017	1.481.584.563	97

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekalongan

Peneliti tertarik untuk menganalisis Tata Kelola Zakat dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat, berdasarkan fakta dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan masih banyak OPZ yang tidak efisien serta terbatasnya penelitian yang mengkaji pengaruh faktor yang mempengaruhi efisiensi penyaluran zakat di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Sharia Enterprise Theory

Menurut akuntansi Islam, tanggung jawab dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi. Inilah yang membedakan tujuan inti akuntansi konvensional secara signifikan. Akuntansi Islam percaya bahwa dengan mengikuti norma-norma akuntansi dan syariah, akuntansi Islam dapat secara efektif berfungsi sebagai saluran antara pemegang saham, entitas, dan masyarakat umum. Keadaan ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi Islam sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan dalam rangka membina hubungan sosial yang baik.

Iwan (2003) mencatat bahwa konsep akuntabilitas dalam akuntansi syariah memiliki bentuk akuntabilitas yang lebih rumit, yaitu manajer organisasi bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, masyarakat, lingkungan, dan Tuhan selain pemilik. Sharia Enterprise Theory adalah nama lain untuk gagasan ini. Ayat 282 QS. Al-Baqarah mendukung pandangan teori ini tentang akuntabilitas, yang menekankan perlunya pencatatan setiap aktivitas transaksi. Menurut Anim (2015), perilaku oportunistik dari pihak agen yang merupakan gejala dari sifat egoistis, materialistis, dan utilitarian seringkali menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Menurut Ali (2015), ada dua jenis akuntabilitas dalam konteks zakat yaitu akuntabilitas primer, atau kewajiban kepada Allah SWT, dan akuntabilitas sekunder, atau tanggung jawab kepada masyarakat.

### Efisiensi Penyaluran Zakat

Efisiensi mengacu pada seberapa baik suatu organisasi menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuannya (Farrell, 1957). Efisiensi adalah praktik membatasi input untuk memaksimalkan output (Rahman, 2007). DCR (Disbursement to Collection Ratio) adalah salah satu metrik yang digariskan dalam Zakat Core Principles (ZCP) untuk mengevaluasi efisiensi penyaluran zakat. Dengan membagi jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang terkumpul, rasio ini menilai kemampuan OPZ dalam menyalurkan zakatnya.

Dalam penelitiannya, Mustaffha (2007) menegaskan bahwa meskipun hanya 15% dari uang tunai yang ditahan, zakat tetap akan disalurkan. Untuk sementara, jika dana zakat ditahan hingga 70%, dianggap tidak efektif. Karena penyaluran zakat yang tidak efektif akan membuat asnaf tidak puas, hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat lebih signifikan daripada pengumpulan zakat.

## Tata Kelola Zakat

Untuk mengatasi masalah sosial ekonomi termasuk kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan pengentasan kemiskinan, zakat berfungsi baik sebagai simbol iman kepada Allah dan cara menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan alokasi dana zakat secara efektif (Achmad, 2012).

Melalui tata kelola zakat yang efisien dan berkualitas, kriteria tersebut dapat dipenuhi. Proses pengambilan keputusan dan bagaimana hal itu dilakukan disebut sebagai tata kelola. Oleh karena itu, Amil harus mematuhi norma tata kelola yang baik dalam OPZ, khususnya transparan dan akuntabel dalam berbagi informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat umum (Wahab, 2013).

## Board Size

Zakat adalah kewajiban agama, pengelola zakat harus melihat apa yang mereka lakukan sebagai tindakan pengabdian atau bahkan jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda:

*“Amil sedekah (zakat) yang bekerja dengan landasan Al-Haq ibarat prajurit fi sabilillah sehingga dia kembali ke rumahnya.” (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Imam Hakim)*

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berjasa sebagai petugas zakat akan mendapatkan pahala yang besar, sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Betapa mulianya gelar yang akan diraih Amil jika mereka dengan setia menjalankan tugasnya.

Menurut Hsu dan Petchsakulwong (2010), jumlah dewan memainkan peran penting dalam memutuskan kebijakan dan mengambil tindakan yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Ukuran dewan yang besar akan lebih berhasil dalam memasok ide-ide penting untuk

memastikan operasi OPZ yang lebih terorganisir dan terencana, atau dengan kata lain, akan meningkatkan efisiensi. Hal ini didukung oleh Tanna et al. (2008), yang berpendapat bahwa jumlah dewan yang banyak dengan berbagai keterampilan masing-masing akan membantu mengamankan sumber daya dan menurunkan ketidakpastian di tempat kerja.

## Professional on Board

Nabi Yusuf AS pernah mengeluarkan pernyataan yang diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

*“Jadikanlah aku (Yusuf) bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan.” (Yusuf: 55)*

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa untuk menduduki suatu profesi, seseorang haruslah akuntabel dan profesional. Dalam beberapa literatur fiqh, syarat untuk menjadi pengelola zakat setidaknya harus: muslim, mukallaf (akil baligh), amanah, mengerti dan memahami dengan baik hukum-hukum di sektor zakat, dan mengerti pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab (Kementerian Agama, 2003: 57).

Tata kelola zakat yang baik membutuhkan staf yang berilmu, amanah dan jujur. Hadits berikut memperjelas ancaman bagi pengelola zakat yang tidak beretika:

*“Jika amanat disia-siakan, maka tunggulah saatnya kehancuran. Abu Hurairah bertanya: Bagaimana amanat itu disia-siakan wahai Rasulullah?, Beliau menjawab: Jika suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya.” (HR. Imam Bukhari)*

Muhammad (2014) menjelaskan bahwa dengan mekanisme zakat yang baik, peningkatan daya beli masyarakat tetap dapat stabil. Maka zakat memiliki peran yang cukup signifikan untuk

menjaga kestabilan ekonomi. Namun semua itu tidak terasa maksimal, jika para dewan yang mengurus pengelolaan zakat di institusi zakat bukanlah orang yang profesional. Akan terjadi permasalahan-permasalahan baik pada pengumpulan maupun efisiensi penyalurannya.

### **Pengembangan Hipotesis Pengaruh Board Size terhadap Disbursement Efficiency (H1)**

Berkaitan dengan semakin banyaknya artikel tentang fraud yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, salah satu tema perbincangan yang erat kaitannya dengan efisiensi adalah governance (FCGI, 2000). Menurut Daniel dan Yeterina (2014), tata kelola yang efektif berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat terjadi pada OPZ. Amelia (2010) sebelumnya telah melakukan penelitian tentang tata kelola yang terbukti berdampak baik terhadap kinerja keuangan organisasi, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas kas masuk dan kas keluar.

Menurut Ali (2011), bisnis memerlukan banyak dewan untuk memantau kinerja keuangan mereka karena mereka harus lebih berhati-hati dalam mengevaluasi efisiensi mereka. Beasley (1996) menyatakan bahwa ukuran dewan harus ketat dalam pengawasannya untuk memenuhi tujuan perusahaan, mengurangi penipuan keuangan, dan meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Untuk itu peneliti menduga bahwa:

*H1: Board Size berpengaruh terhadap Disbursement Efficiency*

Menurut Bambang (2016), ada dua komponen penting dalam sistem administrasi zakat Indonesia. Pertama, penyaluran zakat yang masih belum efektif. Masalah kedua adalah kurangnya personel yang memenuhi syarat yang akan dapat mendistribusikan pembayaran zakat kepada individu yang memenuhi syarat. Di Kabupaten

Banyumas, OPZ dievaluasi oleh Puji dkk. (2015) yang menemukan bahwa mayoritas dewan masih belum profesional. Padahal, pendistribusian zakat membutuhkan profesionalisme amil (dalam hal pelatihan dan pengalaman). Menurut Brown (2005), efektivitas penyaluran zakat akan tercapai jika pengetahuan anggota dewan yang beragam dalam berbagai disiplin ilmu, latar belakang pendidikan yang memadai dengan keahlian dan pengalaman menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Menurut Cloyd (1997), akuntabilitas akan meningkatkan efektivitas selama dewan tersebut profesional. Oleh karena itu, mudah untuk mengabaikan fakta bahwa dewan profesional dengan pengetahuan zakat yang luas dapat menghasilkan dan menjamin efisiensi penyaluran zakat yang dapat dilaksanakan. Untuk itu, peneliti menduga bahwa:

*H2: Professional on Board berpengaruh terhadap Disbursement Efficiency*

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi Dan Sampel**

Metodologi sampel jenuh digunakan dalam proses pemilihan sampel penelitian ini. Strategi ini diterapkan dengan memilih sampel dari populasi lengkap. Populasi OPZ yang berbeda di Kota dan Kabupaten Pekalongan digunakan dalam penelitian ini. Untuk pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan informasi dari laporan keuangan tahun 2016 hingga 2020 untuk menentukan jumlah dewan (board size), dan riwayat hidup masing-masing dewan untuk menentukan jumlah profesional dalam dewan (professional on board).

Adapun secara rinci, populasi sekaligus sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 5 OPZ yaitu (1) BAZNAS Kota Pekalongan, (2) LAZISMU Kota Pekalongan, (3) LAZISMU Kabupaten Pekalongan, (4) LAZ Al Ummah Gerai Pekalongan, dan

(5) Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Gerai Pekalongan.

### Teknik Pengumpulan Data

Data primer digunakan dalam penelitian ini. Data primer, menurut Muhammad (2002: 82), adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri langsung di lapangan. Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti pergi ke objek penelitian yang telah dipilih sebelumnya. Untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan benar-benar dapat diperoleh, peneliti telah melakukan observasi atau studi pendahuluan.

Laporan keuangan merupakan salah satu data yang dikumpulkan. Akibat banyaknya OPZ yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya, beberapa akademisi merasa kesulitan untuk mengakses informasi ini. Baik Jamaliah (2004) dan Rokyah (2004) telah melalui ini. Faktanya, mayoritas OPZ masih menghasilkan laporan keuangan. Namun, hanya ditujukan untuk kalangan manajemen atau internal saja. Padahal banyak pihak lain, seperti muzakki, mustahiq, lingkungan sekitar, mahasiswa, dan pemerintah, yang membutuhkannya. Agar lebih akuntabel, OPZ harus membuat laporan keuangannya tersedia untuk publik melalui situs webnya atau saluran lainnya.

### Pengukuran Variabel Dan Definisi Operasional

Variabel dependen berikut pengukurannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Dependen**

Variabel Dependen	Definisi Operasional
<i>Disbursement Efficiency</i>	<i>Disbursement Efficiency</i> merupakan tingkat efisiensi penyaluran dana zakat berdasarkan persentase terhadap dana zakat yang

terkumpul sehingga bisa diketahui apakah dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan semua atau tidak

Dalam mengukur *disbursement efficiency*, menggunakan *disbursement to collection ratio (DCR)* yang bermakna sebagai berikut:

- > 90% : *highly efficien*
- 70% - 89% : *efficien*
- 50% - 69% : *fairly efficien*
- 20% - 49% : *below expectation*
- < 20 % : *zalim*

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel ini sering disebut sebagai variabel prediktor (Suliyanto, 2011: 7). Berikut variabel independen dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

**Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Independen dan Pengukurannya**

No.	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
1.	<i>Board Size</i>	<i>Board Size</i> merupakan ukuran dewan yang bertugas mengurus segala aktivitas pengelolaan zakat	Jumlah Dewan
2.	<i>Professional on Board</i>	<i>Professional on Board</i> merupakan komposisi tenaga ahli dalam dewan pengurus zakat yang terdiri atas orang-orang berpendidikan dan berpengalaman dalam bidang zakat	Jumlah Profesional dalam Dewan

## HASIL DAN PEMBAHAAN

### Hasil

#### Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah nilai residual atau variabel pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2011: 160). Jika nilai residu terstandarisasi umumnya mendekati nilai rata-rata, maka nilai residu dikatakan berdistribusi normal (Suliyanto, 2011: 69). Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (KS) digunakan dalam penelitian ini, dan berikut hasil yang diperoleh:

**Tabel 4.**  
**Tabel Uji Normalitas Variabel**  
**Disbursement Efficiency**

Variabel	Hasil Uji Normalitas KS
Dependen:	Observasi: 25
Disbursement Efficiency (Y)	Dn: 0,170
Independen:	KS Tabel: 0,237
Board Size (X1)	
Professional on Board (X2)	

Sumber : Data primer diolah (2021)

Diketahui nilai uji Dn sebesar 0,170 berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5. Hasil tersebut lebih kecil dibandingkan dengan KS Tabel = 0,237. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa residu dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk menentukan apakah kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-1 berkorelasi dalam model regresi (sebelumnya). Pengamatan yang semuanya terhubung satu sama lain menyebabkan terjadinya autokorelasi. Uji Durbin-Watson (DW) digunakan dalam analisis autokorelasi penelitian ini. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Tabel Uji Autokorelasi Variabel**  
**Disbursement Efficiency**

Variabel	Hasil Autokorelasi D-W
Dependen:	Observasi: 25
Disbursement Efficiency (Y)	Durbin-Watson Stat. : 2,562
Independen:	
Board Size (X1)	
Professional on Board (X2)	

Sumber: Data primer diolah (2021)

Tabel 5 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,562. Pada tabel Durbin-Watson dengan  $n=25$ ,  $k=2$ , maka diperoleh nilai batas bawah (dL)=0,106 dan nilai batas atas (dU)=1,550. Nilai 4-dU sebesar  $4 - 0,160 = 2,794$ . Nilai 4-dL sebesar  $4 - 1,550 = 2,450$ . Dengan demikian, nilai DW terletak di antara 4-dU dan 4-dL yaitu  $2,450 < 2,562 < 2,794$ , sehingga uji autokorelasi dalam penelitian ini dinyatakan tanpa kesimpulan.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser dan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 6.**  
**Tabel Uji Heteroskedastisitas Variabel**  
**Disbursement Efficiency**

Variabel	Signifikansi
Dependen: Disbursement Efficiency (Y)	
Independen:	
Board Size (X1)	0,404
Professional on Board (X2)	0,465

Sumber : Data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel sebesar 0,404 dan 0,465 sehingga semuanya  $> 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Besarnya kemampuan model untuk menjelaskan variabel

terikat ditentukan oleh koefisien determinasi. Nilai R<sup>2</sup> yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen dibatasi. Karena ada lebih dari dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, nilai penyesuaian R<sup>2</sup> (adjusted R<sup>2</sup>) adalah nilai yang digunakan. Pengujian koefisien determinasi menghasilkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 7.**  
**Tabel Uji Koefisien Determinasi Variabel**  
***Disbursement Efficiency***

Variabel	Hasil Koefisien Determinasi	Uji
Dependen: Disbursement Efficiency (Y)	R Square: 0,19 Adjusted Square: 0,12	R
Independen: Board Size (X1) Professional on Board (X2)		

Sumber: Data primer diolah (2021)

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai R<sup>2</sup> terkoreksi adalah 0,12 yang merupakan nilai R<sup>2</sup>. Menurut angka ini, variabel jumlah dewan dan jumlah profesional dalam dewan dapat menjelaskan 12% dari perubahan dalam variabel efisiensi penyaluran, sementara faktor eksternal lainnya menyumbang 88% sisanya.

#### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tujuan utama uji statistik F adalah untuk menentukan apakah variabel independen atau independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh gabungan terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah bagaimana hasil uji F diperoleh:

**Tabel 8.**  
**Tabel Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Variabel	Nilai Prob F-statistic
Independen: Board Size(X1), Professional on Board(X2)	
Dependen: Disbursement Efficiency (Y)	0,09

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa untuk variabel Y1 (*disbursement efficiency*) nilai signifikansi sebesar  $0,09 \leq 0,10$ . Artinya variabel *board size* dan *professional on board* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *disbursement efficiency*.

#### Uji Hipotesis/Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *board size* dan *professional on board* secara individu terhadap *disbursement efficiency* pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,10$  diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 9.**  
**Tabel Hasil Uji Regresi Berganda**

Hipotesis	Hasil Regresi
H <sub>1</sub> : <i>board size</i> berpengaruh terhadap <i>disbursement efficiency</i>	0,07
H <sub>2</sub> : <i>professional on board</i> berpengaruh terhadap <i>disbursement efficiency</i>	0,09

Sumber: Data primer diolah (2021)

Hipotesis 1 yang menjelaskan pengaruh variabel *board size* terhadap *disbursement efficiency* menghasilkan tingkat signifikansi (probabilitas) sebesar 0,07. Tingkat signifikansi ini lebih kecil dari *alpha* yaitu  $0,07 < 0,10$ . Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yang berbunyi *board size* berpengaruh terhadap *disbursement efficiency* diterima.

Hipotesis 2 yang menjelaskan pengaruh variabel *professional on board* terhadap *disbursement efficiency* menghasilkan tingkat signifikansi (probabilitas) sebesar 0,09. Tingkat signifikansi ini lebih kecil dari *alpha* yaitu  $0,09 < 0,10$ . Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yang berbunyi *professional on board* berpengaruh positif terhadap *disbursement efficiency* diterima.

#### Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan berdampak pada efisiensi penyaluran. Ini menyiratkan bahwa efisiensi penyaluran zakat meningkat seiring dengan banyaknya jumlah dewan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ali (2015) yang melakukan penelitian serupa di Brunei Darussalam. Doyle (2005) menegaskan bahwa OPZ memang membutuhkan dewan yang banyak. Menurut penelitian Ali dkk (2014), akan lebih mudah bagi dewan di perusahaan berbasis laba untuk berhasil mengontrol kinerja manajemen.

Menurut temuan penelitian, jumlah dewan akan berdampak pada tujuan organisasi, yaitu efisiensi penyaluran zakat. Konsolidasi pengawasan dalam menyampaikan dan memverifikasi data dan informasi yang benar dan terintegrasi dapat diwujudkan dengan ukuran dewan yang besar.

Dewan memainkan posisi penting dalam proses pengambilan keputusan organisasi dan sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan tujuan. Pilihan yang mereka buat, atau lebih tepatnya seberapa efektif mereka membuatnya, secara signifikan mempengaruhi seberapa baik kinerja organisasi pengelola zakat (Hsu dan Petchsakulwong, 2010).

Dalam disertasinya, Rehli (2011) menguraikan bagaimana dewan organisasi nirlaba biasanya masih memiliki sudut pandang yang sama dengan dewan organisasi berbasis laba. Tentu hal ini sangat meresahkan. Prinsip-prinsip kedermawanan yang diulang-ulang dalam organisasi nirlaba seperti OPZ telah sedikit dinodai oleh keinginan dewan yang semata-mata mengutamakan kesejahteraannya sendiri di atas kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, para muzakki yang mengharapkan pemberian hak mereka dengan cepat tampaknya tidak menjadi prioritas dewan. Menurut Ingram (2015), dewan dalam organisasi nirlaba harus bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan. Mereka bertugas mengamankan dana yang ada

di dalamnya. Menurut sharia enterprise theory, jumlah dewan akan berdampak pada seberapa baik dana zakat digunakan.

Temuan studi ini juga mendukung hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa jumlah profesional dalam dewan akan meningkatkan efisiensi penyaluran zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Ali (2015) yang melakukan penelitian terkait di Brunei Darussalam.

Menurut Snowdown dan Rajacich (1993), tanggung jawab profesional adalah satu-satunya cara untuk memastikan akuntabilitas penuh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keahlian yang luas dalam industri khusus mereka, yang akan meningkatkan efisiensi. Jika dewan secara efektif melaksanakan tanggung jawabnya, tata kelola dapat berfungsi. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah bahwa susunan dewan harus memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan efektif serta independensi (Maria, 2013).

Menurut Dohmann (2009), dewan profesional dengan struktur tata kelola yang sesuai akan lebih bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan mencapai penilaian mengenai tugas manajemen kepada masyarakat. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bertindak cepat yang berakibat meningkatnya efektivitas organisasi. Menurut Hsu dan Petchsakulwong (2010), dewan profesional akan bertindak secara profesional dan membuat keputusan yang tepat lebih cepat.

Menurut penelitian Puji dkk (2015) yang meneliti OPZ di Kabupaten Banyumas, menyatakan bahwa pendistribusian zakat membutuhkan beberapa profesional (dalam hal pelatihan dan pengalaman). Hal ini diperkuat oleh Bambang (2016). Dia mengklarifikasi pentingnya dua faktor dalam administrasi zakat Indonesia. Pertama, penyaluran zakat yang masih

belum efektif. Masalah kedua adalah kurangnya personel yang memenuhi syarat yang akan dapat mendistribusikan pembayaran zakat kepada individu yang memenuhi syarat. Isu kedua ini lebih krusial bagi efektivitas penyaluran zakat karena sejalan dengan sharia enterprise theory yang menekankan pentingnya kemampuan individu dalam berinteraksi dengan Allah SWT, sesama, dan alam. Oleh karena itu, jika dewan zakat terdiri dari orang-orang yang berilmu dan terampil di bidangnya, maka penyaluran zakat akan efisien.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa *board size* dan *professional on board* berpengaruh positif terhadap efisiensi penyaluran zakat. Berkaitan dengan *sharia enterprise theory*, dalam konsep *hablumminannas*, pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana zakat tentu akan lebih percaya dan merasa aman manakala dana zakat dikelola oleh tenaga ahli (professional) atau orang yang benar-benar tahu tentang hukum zakat sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan bisa diminimalisasi atau dengan kata lain lebih efisien.

## SARAN

Bagi peneliti selanjutnya, saran yang diberikan adalah melakukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui alasan mengapa terjadi arah pengaruh tata kelola zakat terhadap efisiensi penyaluran zakat. Cara yang dapat digunakan adalah dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara terhadap masing-masing elemen pengurus OPZ.

Bagi umat, bisa memberikan sumbangsih dalam tata kelola zakat yaitu dengan ikut memilih profesional atau tokoh masyarakat yang berkompeten di bidang zakat serta ikut mengawasi praktik akuntabilitas OPZ dengan melihat efisiensi penyaluran zakat. Dengan penyaluran zakat yang

efisien, akan membantu mustahiq dalam mengambil hak mereka dan membuat perekonomian mereka sedikit terbantu.

Sedangkan bagi muzakki, akan membuat hati mereka lebih nyaman karena dana zakat yang dia salurkan benar-benar sampai kepada yang berhak sesuai syariat islam sehingga mereka akan lebih percaya kepada OPZ dan tidak lagi menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq melainkan melalui lembaga yang memang sudah diberi amanat oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat demi kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani. 2016. Zakat Management in Indonesia and Brunei Darussalam. *Munich Personal RePec Archive, No.71561*
- Aan Slamet Rusydiana dan Salman Al-Farisi. 2016. The Efficiency of Zakah Institutions Using Data Envelopment Analysis. *AL-IQTISHAD Jurnal of Islamic Economics, Vol.8, No.2, Hal.213-226*
- Achmad Syaiful Hidayat Anwar. 2012. Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang). *Jurnal Humanity, Vol.7, No.2, Hal.1-13*
- Agus Widarjono. 2016. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ahmad, Ismail dan Masturah Ma'in. 2014. The Efficiency of Collection and Distribution: Evidence from Two Stage Analysis. *Journal of Economic Cooperation and Development, Vol.35, No.3, Hal.133-170*
- Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung. 2006. *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Ahmad, Raja Adzirin Raja, et al. 2015. Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. *Procedia Economics and Finance*, No.31, Hal.141-150
- Alfi Lestari. 2015. Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah : Pendekatan *Data Envelopment Analysis*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.16, No.2, Hal.177-187
- Ali Muktiyanto, 2011. Pengaruh Interpedensi Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.8, No.2, Hal. 197-213
- Ali, Nasir, et al. 2014. The Effect of Corporate Governance on Capital Structure Decisions: A Case of Saudi Arabian Banking Sector. *Acta Universitatis Danubius*, Vol.10, No.2, Hal.51-60
- Ali, Nurul Nabilah Haji. 2015. *The Influence of Governance to Zakat Disbursement Efficiency: Empirical Evidence from Brunei Darussalam*. Tesis. Malaysia: International Islamic University Malaysia
- \_\_\_\_\_. 2016. Zakat Management in the era Caliph Umar bin Abdul Aziz. *Persidangan Antarabangsa Kepimpinan dan Pengurusan Islam, Universitas Islam Sultan Sharif Ali, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 6 Agustus 2016*
- Amelia Lindawati. 2010. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol.2, No.1, Hal. 35-49
- Anim Rahmayati. 2015. Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas. *Syariah Paper Accounting Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia*
- Bambang P.S Bodjonegoro. 2016. Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Seminar Nasional Peran Strategis Zakat dalam Cetak Biru Ekonomi Pembangunan Indonesia, Jakarta, Indonesia, 8 Agustus 2016*
- Bashir, Mohamed Sharif dan Nurul Nabilah Haji Ali. 2012. Analysis Zakat Management in Brunei Darussalam. *IJMS*, Vol.19, No.2, Hal.75-102
- Beasley, Mark S. 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, Vol.71, No.1, Hal.433-46
- Brown, William A. 2005. Exploring The Association Between Board and Organizational Performance in Nonprofit Organizations. *Nonprofit Management and Leadership*, Vol.13, No.3, Hal.317-339
- Buckmaster, N. 1999. Associations between Outcome measurement, Accountability, and Learning for Nonprofit Organizations. *The International Journal of Public Sector Management*, Vol.12, Hal.124-132
- Caulfield, Helen. 2005. *Vital Notes for Nurses: Accountability*. Malden: Blackwell
- Cloyd, C. Bryan. 1997. Performance in Research Tasks: The Join Effect of Knowledge and Accountability. *The Accounting Review*, Vol.72, No.1, Hal.111-131
- Daniel Felimanto Hartono dan Yeterina Widi Nugrahanti. 2014. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, Vol.3, No.2, Hal.1-22

- Didin Hafidhuddin. 2009. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani
- Dohmann, Eileen Levin. 2009. *Accountability in Nursing: Six Strategies to Build and Maintain A Culture of Comittment*. Marblehead: HCpro, Inc
- Doyle, Lynne M. 2005. Nonprofit Board Accountability: A Literature Review and Critique. *SPNA Review, Vol.1, No.1, Hal.27-37*
- Farrell, M.J. 1957. The Measurement of Productive Efficiency. *Journal of Royal Statistical Society, Vol.120, No.3, Hal.253-290*
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2000. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: FCGI
- Hsu, Wen Yen dan Pengpitch Petchsakulwong. 2010. The Impact of Corporate Governance on the Efficiency Performance of Thai Non-Life Insurance Industry. *The Ganeva Pappers, No.25*
- Horvath, Roman dan Persida Spirollari. 2012. Do The Board of Directors Characteristics Influence Firm's Performance? The U.S Evidence. *Prague Economic Papers, Vol.4, Hal.470-486*
- Ingram, Richard T. 2015. *Ten Basic Responibilities of Nonprofit Boards*. Washington: Board Source
- Imam Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Irfan Syauqi Beik, et al. 2014. Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System. *Working Group of Zakat Core Principles*
- Irfan Syauqi Beik. 2015. Towards International Standard of Zakat System. *Fiqh Zakat International Conference, Kula Lumpur, Malaysia, 25-26 November 2015*
- Iwan Triyuwono. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *AL-IQTISHAD Journal of Islamic Economics, Vol.4, No.1, Hal.79-90*
- Jamaliah, A.M. 2004. *Performance Measurement of Malaysia Zakat Institutions: Perception of Senior Managers of The Malaysia Zakat Institutions*. Tesis. Malaysia: International Islamic University Malaysia
- Kahf, Monzer. 1989. Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh. *Journal of Islamic Economics, Vol.2, No.1, Hal.1-22*
- Keating, Elizabeth dan Peter Frumkin. 2003. Reengineering Nonprofit Financial Accountability: Toward A More Reliable Foundation for Regulation. *Public Administration Review, Vol.63, Hal.3-16*
- Kementerian Agama. 2013. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Maria Fransisca Widyati. 2013. Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Majerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.1, No.1, Hal.234-249*
- Muhammad Arif Ujijantho dan Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, 26-28 Juli 2007*
- Muhammad Aziz. 2014. Regulasi Zakat di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Vol.4, No.1, Hal.22-38*
- Muhammad Firdaus, et al. 2012. *Economics Estimations and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. Jeddah:

- International Research and Training Institute
- Muhammad Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhammad Mulyadi. 2011. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol.15, No.1
- Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Rafika Rahmawati. 2016. Efficiency and Profitability on Indonesian Islamic Banking Industry. *AL-IQTISHAD Journal of Islamic Economics*, Vol.8, No.1, Hal.33-48
- Muhammad Nizarul Alim. 2015. Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 211, Hal.232-236
- Muhammad Soleh Nurzaman. 2010. Zakat and Human Development: An Emprical Analysis on Poverty Alleviation in Jakarta, Indonesia. *Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation*
- Mustaffha, Nazifah. 2007. *Zakat Disbursement Efficiency: A Comparative Study of Zakat Institutions in Malaysia*. Disertasi. Malaysia: International Islamic University Malaysia
- Mutiara Dwi Sari, et al. 2013. Review on Indonesian Zakah Management and Obtacles. *Social Sciences*, Vol.2, No.2, Hal.76-89
- Nasher Akbar. 2009. Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis. *TAZKIA Islamic Finance Business Review*, Vol.4, No.2, Hal.760-784
- Nikmatuniayah, dan Marliyati. 2015. Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *MIMBAR*, Vol.31, No.2, Hal.485-494
- Noor, Abd Halim Mohd, et al. 2014. What The Determine Professionalism? A Study on Zakat Institutions Integration Effort into The Mainstream Economy. *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol.27, No.2, Hal.983-993
- \_\_\_\_\_. 2015. Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence Zakat Organizations Performances in Malaysia. *Journal of Economics, Business, and Management*, Vol.3, No.2
- Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.4, No.3, Hal.376-388
- Nurul Widyati Islami Rahayu. 2014. Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan *Good Governance* di Jember. *KARSA*, Vol.22, No.2
- Oran, Ahmad F. 2009. Zakat Funds and Wealth Creation. *Review of Islamic Economics*, Vol.13, No.1, Hal.143-154
- Puji Lestari, et al. 2015. Identifikasi Faktor Organisational dalam Pengembangan “E-Governance” pada Organisasi Pengelola Zakat. *MIMBAR*, Vol.31, No.1, Hal.221-228
- Raheja, Charu G. 2005. Determinants of Board Size and Composition: A Theory of Corporate Boards. *Journal of Finance and Quantitative Analysis*, Vol.40, No.2, Hal.283-306
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. 2007. Pre-Requisites for Effective Integration of Zakat into Maistream Islamic Financial System in Malaysia. *Islamic Economis Studies*, Vol.14, No.2
- Rahman, Azman Abdul, et al. 2012. Zakat Institutions in Malaysia. *GIAT*, Vol.2, No.1, Hal.35-41
- Rehli, Florian. 2011. *Governance of International Nongovernmental*

- Organizations*. Disertasi. Switzerland: University of St.Gallen
- Reza Alvionita dan Nur Hisamuddin. 2015. Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*
- Rokyah, Siti. 2004. *Determinant of Financial Reporting Practices Waqf by State Islamic Religions Council in Malaysia*. Disertasi. Malaysia: International Islamic University Malaysia
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Sigit Hermawan dan Restu Widya Rini. 2016. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.1, No.1, Hal.12-24*
- Sugiyarti Fatma Laela. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. *TAZKIA Islamic Finance Business Review, Vol.5, No.2*
- Shirazi, Nasim Shah. 2006. Providing for the Resource Shortfall for Poverty Elimination through the Institution of Zakat in Low-Income Muslim Countries. *IJUM Journal of Economics and Management, Vol.14, No.1*
- Snowdown, A. dan D. Rajacich. 1993. The Challenge Accountabilty in Nursing. *Nursing Forum, Vol.28, Hal.5-11*
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi
- Suwito, et al., 2016. Construction of Sharia Accounting, Zakat, Infaq, and Amal. *Research Journal of Finance and Accounting, Vol.7, No.8, Hal.122-131*
- Tanna, S., et al. 2008. *The Effect of Board Size and Composition of The Efficiency of UK Banks. Economics, Finance, and Accounting Applied Research Working Paper Series, Conventry University Business School, United Kingdom*
- Ulfiyani Asdiansyuri. 2016. Analisis Pengaruh Pengeluaran Zakat terhadap Kesejahteraan Muzakki (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat). *International Journal of Social and Local Economic Governance, Vol.2, No.1, Hal.23-31*
- Wahab, Norazlina Abdul. 2013. *Efficiency and Governance of Zakat Institutions in Malaysia*. Disertasi. Malaysia: International Islamic University Malaysia
- Wahab, Norazlina Abdul dan Abdul Rahim Abdul Rahman. 2011. A Framework to Analyse Efficiency and Governance of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol.2, No.1, Hal.43-62*
- Yosi Dian Endahwati. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol.4, No.2*